

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa dikenal dengan TIK berkembang dengan pesat di era sekarang ini, terutama dalam membantu segala aktivitas manusia untuk memperoleh informasi dari orang lain. Oleh sebab itu, dengan adanya teknologi informasi manusia bisa mengakses informasi dari kalangan mana saja baik dari internet dan fasilitas-fasilitas teknologi yang menunjang. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah memasuki ranah formal maupun non formal. Dalam ranah formal dapat dilihat pada sistem birokrasi pemerintahan dan ranah non formal seperti jejaring sosial.

Sistem birokrasi pemerintahan tentunya memiliki prinsip dan aturan yang benar-benar di taati oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Karena pada dasarnya birokrasi pemerintahan terbentuk untuk mengatur suatu pekerjaan. Kita memandang bahwa, hal yang sering ditekankan kepada setiap pegawai adalah tentang kedisiplinan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab terutama persoalan disiplin terhadap waktu masuk kantor sesuai dengan keputusan dan aturan yang diberlakukan. Hal ini bisa dilihat pada Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan kepada negara melalui daerah masing-masing. Pegawai Negeri Sipil memiliki disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maeyasari (2012:3) mengatakan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman.

Dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang disiplin, tidak hanya membutuhkan peraturan-peraturan yang telah berlaku melainkan juga membutuhkan seorang pimpinan yang akan memberikan motivasi maupun ganjaran terhadap setiap pegawai yang tidak disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai seorang pimpinan, memiliki tanggung jawab untuk melakukan komunikasi dengan bawahan terkait dengan masalah disiplin.

Kenyataan saat ini masih ada pegawai yang kurang disiplin dengan tanggungjawabnya, terutama disiplin waktu kerja. Hal ini terjadi di kantor BAPPEDA dan DKAD Provinsi Gorontalo. Padahal kantor dinas sudah menerapkan absensi *finger print* berbasis *web*. Dengan adanya penerapan absensi sidik jari berbasis *web* ini diharapkan para pegawai menjadi konsisten terhadap jam kerja yang sudah menjadi ketentuan sebelumnya, karena data-data kehadiran yang ada dalam absensi ini tidak bisa dimanipulasi oleh siapa pun selain operator yang diberikan hak akses untuk menangani absensi ini.

Penerapan aplikasi absensi berbasis *web* ini dikembangkan dan diterapkan pertamakali di Universitas Gorontalo pada tahun 2011 dan dilanjutkan ke instansi-instansi lainnya seperti instansi pemerintahan seperti di kantor Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo bahkan di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, penerapan ini tidak berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya pegawai yang tidak disiplin dalam jam kerja terutama jam masuk kantor.

Hal ini memerlukan komunikasi dari seorang pimpinan untuk mencegah hal tersebut agar tidak berjalan secara terus menerus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang "*Fungsi Komunikasi Pimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Penerapan Sidik Jari Berbasis Web Di BAPPEDA Dan DKAD Provinsi Gorontalo*".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pegawai yang tidak disiplin dengan jam kerja.
2. Sebagian pegawai BAPPEDA dan DKAD Provinsi Gorontalo yang belum paham tentang absensi sidik jari berbasis *web*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi komunikasi pimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja PNS di BAPPEDA dan DKAD Provinsi Gorontalo ?
2. Bagaimana hambatan komunikasi pimpinan dalam meningkatkan disiplin PNS di BAPPEDA Provinsi Gorontalo dan DKAD Provinsi Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi komunikasi pimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja PNS di BAPPEDA dan DKAD Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi pimpinan dalam meningkatkan disiplin kerja PNS di BAPPEDA dan DKAD Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai masukan terhadap ilmu komunikasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dibidang komunikasi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.
- 2) Sebagai bahan masukan terhadap BAPPEDA dan DKAD Provinsi Gorontalo, dalam hal kedisiplinan pegawai yang ada di lingkungannya.